

KLD melaksanakan AKSI PK 2023-2024

<i>KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH</i>	<i>AKSI</i>
Badan Informasi Geospasial	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Badan Keamanan Laut	Penguatan Peran APIP dalam Program Pengawasan Pembangunan
Badan Kepegawaian Negara	Penguatan Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Merit
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Perbaikan Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Badan Narkotika Nasional	Penguatan Integritas Penanganan Perkara Pidana
Badan Pemeriksa Keuangan	Penguatan Partai Politik dalam pencegahan korupsi
Badan Pengawas Obat dan Makanan	Penguatan Pengendalian Ekspor dan Impor
Badan Pengawas Pemilu	Penguatan Peran APIP dalam Program Pengawasan Pembangunan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim 2023 dan 2024
	Penguatan Peran APIP dalam Program Pengawasan Pembangunan
	Perbaikan Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Badan Pengusahaan Batam (BP Batam)	Penguatan Peran APIP dalam Program Pengawasan Pembangunan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	Optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah
Badan Pusat Statistik	Perbaikan Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Badan Riset dan Inovasi Nasional	Penguatan Partai Politik dalam pencegahan korupsi
	Penguatan Peran APIP dalam Program Pengawasan Pembangunan
Badan Siber dan Sandi Negara	Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim 2023 dan 2024
Kabupaten Bandung	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kabupaten Bandung Barat	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kabupaten Bantaeng	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kabupaten Barito Selatan	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kabupaten Barito Timur	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kabupaten Barito Utara	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kabupaten Bekasi	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kabupaten Bengkalis	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kabupaten Berau	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kabupaten Bogor	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kabupaten Buleleng	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kabupaten Cirebon	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta

KLD melaksanakan AKSI PK 2023-2024

<i>KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH</i>	<i>AKSI</i>
Kabupaten Enrekang	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kabupaten Garut	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kabupaten Gianyar	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kabupaten Gunung Mas	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kabupaten Indragiri Hilir	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kabupaten Indragiri Hulu	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kabupaten Indramayu	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kabupaten Jembrana	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kabupaten Kampar	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kabupaten Kapuas	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kabupaten Karawang	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kabupaten Katingan	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kabupaten Kotawaringin Barat	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kabupaten Kotawaringin Timur	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kabupaten Kuantan Singingi	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kabupaten Kutai Barat	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kabupaten Kutai Kartanegara	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kabupaten Kutai Timur	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kabupaten Lamandau	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kabupaten Lebak	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kabupaten Mahakam Ulu	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kabupaten Majalengka	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kabupaten Mamuju	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kabupaten Mamuju Tengah	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta

KLD melaksanakan AKSI PK 2023-2024

<i>KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH</i>	<i>AKSI</i>
Kabupaten Meranti	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kabupaten Murung Raya	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kabupaten Pandeglang	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kabupaten Pasangkayu	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kabupaten Paser	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kabupaten Pelalawan	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kabupaten Penajam Paser Utara	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kabupaten Pulang Pisau	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kabupaten Purwakarta	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kabupaten Rokan Hilir	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kabupaten Rokan Hulu	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kabupaten Serang	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kabupaten Seruyan	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kabupaten Siak	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kabupaten Subang	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kabupaten Sukabumi	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kabupaten Sukamara	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kabupaten Sumedang	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kabupaten Tabanan	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kabupaten Tangerang	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kejaksaan Agung	Penguatan Integritas Penanganan Perkara Pidana
	Peningkatan kualitas data pemilik manfaat/ beneficial ownership serta pemanfaatan untuk perizinan, pengadaan barang/jasa, dan penanganan perkara
Kementerian Agama	Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim 2023 dan 2024
	Penguatan Peran APIP dalam Program Pengawasan Pembangunan
	Perbaikan Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

KLD melaksanakan AKSI PK 2023-2024

KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH	AKSI
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2023 dan 2024
	Mengurangi risiko kebocoran pendapatan negara melalui penataan "aset tetap" pemerintah pusat.
	Optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah
	Penguatan Peran APIP dalam Program Pengawasan Pembangunan
	Peningkatan kualitas data pemilik manfaat/ beneficial ownership serta pemanfaatan untuk perizinan, pengadaan barang/jasa, dan penanganan perkara
	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
	Perbaikan Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2023 dan 2024
	Penguatan Pengawasan pada Badan Usaha Pemerintah (BUMN, BUMD)
	Peningkatan kualitas data pemilik manfaat/ beneficial ownership serta pemanfaatan untuk perizinan, pengadaan barang/jasa, dan penanganan perkara
	Perbaikan Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Kementerian Dalam Negeri	Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2023 dan 2024
	Mengurangi risiko kebocoran pendapatan negara melalui penataan "aset tetap" pemerintah pusat.
	Optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah
	Penguatan Partai Politik dalam pencegahan korupsi
	Penguatan Pengawasan pada Badan Usaha Pemerintah (BUMN, BUMD)
	Penguatan Peran APIP dalam Program Pengawasan Pembangunan
	Peningkatan kualitas data pemilik manfaat/ beneficial ownership serta pemanfaatan untuk perizinan, pengadaan barang/jasa, dan penanganan perkara
	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
	Perbaikan Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
	Reformasi Tata Kelola Pelabuhan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2023 dan 2024
	Optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah
	Penguatan Peran APIP dalam Program Pengawasan Pembangunan
	Perbaikan Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
	Reformasi Tata Kelola Pelabuhan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2023 dan 2024

KLD melaksanakan AKSI PK 2023-2024

KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH	AKSI
	Optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah
	Penguatan Pengawasan pada Badan Usaha Pemerintah (BUMN, BUMD)
	Penguatan tata kelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada komoditas mineral dan batu bara
	Peningkatan kualitas data pemilik manfaat/ beneficial ownership serta pemanfaatan untuk perizinan, pengadaan barang/jasa, dan penanganan perkara
	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
	Perbaiki Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Penguatan Integritas Penanganan Perkara Pidana
	Peningkatan kualitas data pemilik manfaat/ beneficial ownership serta pemanfaatan untuk perizinan, pengadaan barang/jasa, dan penanganan perkara
	Perbaiki Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
	Reformasi Tata Kelola Pelabuhan
Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal	Penguatan tata kelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada komoditas mineral dan batu bara
	Peningkatan kualitas data pemilik manfaat/ beneficial ownership serta pemanfaatan untuk perizinan, pengadaan barang/jasa, dan penanganan perkara
	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
	Percepatan proses digitalisasi sertifikasi badan usaha dan profesi pendukung kemudahan berusaha
Kementerian Kelautan dan Perikanan	Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim 2023 dan 2024
	Penguatan Pengendalian Ekspor dan Impor
	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
	Perbaiki Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
	Reformasi Tata Kelola Pelabuhan
Kementerian Kesehatan	Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim 2023 dan 2024
	Mengurangi risiko kebocoran pendapatan negara melalui penataan "aset tetap" pemerintah pusat.
	Optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah
	Penguatan Pengendalian Ekspor dan Impor
	Perbaiki Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
	Reformasi Tata Kelola Pelabuhan

KLD melaksanakan AKSI PK 2023-2024

KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH	AKSI
Kementerian Ketenagakerjaan	Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2023 dan 2024
	Percepatan proses digitalisasi sertifikasi badan usaha dan profesi pendukung kemudahan berusaha
Kementerian Keuangan	Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2023 dan 2024
	Mengurangi risiko kebocoran pendapatan negara melalui penataan "aset tetap" pemerintah pusat.
	Optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah
	Penguatan Partai Politik dalam pencegahan korupsi
	Penguatan Pengendalian Ekspor dan Impor
	Penguatan Peran APIP dalam Program Pengawasan Pembangunan
	Penguatan tata kelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada komoditas mineral dan batu bara
	Peningkatan kualitas data pemilik manfaat/ beneficial ownership serta pemanfaatan untuk perizinan, pengadaan barang/jasa, dan penanganan perkara
	Perbaiki Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
	Reformasi Tata Kelola Pelabuhan
Kementerian Komunikasi dan Informatika	Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2023 dan 2024
	Penguatan Integritas Penanganan Perkara Pidana
	Penguatan Peran APIP dalam Program Pengawasan Pembangunan
	Perbaiki Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Penguatan tata kelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada komoditas mineral dan batu bara
	Reformasi Tata Kelola Pelabuhan
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2023 dan 2024
	Penguatan Peran APIP dalam Program Pengawasan Pembangunan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2023 dan 2024
	Optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah
	Penguatan Pengendalian Ekspor dan Impor
	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
	Percepatan proses digitalisasi sertifikasi badan usaha dan profesi pendukung kemudahan berusaha
	Reformasi Tata Kelola Pelabuhan
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Penguatan Integritas Penanganan Perkara Pidana
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2023 dan 2024

KLD melaksanakan AKSI PK 2023-2024

KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH	AKSI
	Penguatan Peran APIP dalam Program Pengawasan Pembangunan
	Peningkatan kualitas data pemilik manfaat/ beneficial ownership serta pemanfaatan untuk perizinan, pengadaan barang/jasa, dan penanganan perkara
	Reformasi Tata Kelola Pelabuhan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2023 dan 2024
	Penguatan Pengendalian Ekspor dan Impor
	Peningkatan kualitas data pemilik manfaat/ beneficial ownership serta pemanfaatan untuk perizinan, pengadaan barang/jasa, dan penanganan perkara
	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
	Perbaiki Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
	Reformasi Tata Kelola Pelabuhan
Kementerian Luar Negeri	Perbaiki Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Perbaiki Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2023 dan 2024
	Mengurangi risiko kebocoran pendapatan negara melalui penataan "aset tetap" pemerintah pusat.
	Peningkatan kualitas data pemilik manfaat/ beneficial ownership serta pemanfaatan untuk perizinan, pengadaan barang/jasa, dan penanganan perkara
	Perbaiki Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
	Percepatan proses digitalisasi sertifikasi badan usaha dan profesi pendukung kemudahan berusaha
Kementerian Pemuda dan Olahraga	Penguatan Peran APIP dalam Program Pengawasan Pembangunan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2023 dan 2024
	Penguatan Integritas Penanganan Perkara Pidana
	Penguatan Peran APIP dalam Program Pengawasan Pembangunan
	Penguatan Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Merit
	Reformasi Tata Kelola Pelabuhan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2023 dan 2024
	Mengurangi risiko kebocoran pendapatan negara melalui penataan "aset tetap" pemerintah pusat.
	Perbaiki Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Kementerian Perdagangan	Penguatan Pengendalian Ekspor dan Impor

KLD melaksanakan AKSI PK 2023-2024

KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH	AKSI
	Penguatan Peran APIP dalam Program Pengawasan Pembangunan
	Penguatan tata kelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada komoditas mineral dan batu bara
	Peningkatan kualitas data pemilik manfaat/ beneficial ownership serta pemanfaatan untuk perizinan, pengadaan barang/jasa, dan penanganan perkara
	Reformasi Tata Kelola Pelabuhan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas	Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2023 dan 2024
	Penguatan Integritas Penanganan Perkara Pidana
	Penguatan Peran APIP dalam Program Pengawasan Pembangunan
Kementerian Perhubungan	Penguatan tata kelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada komoditas mineral dan batu bara
	Peningkatan kualitas data pemilik manfaat/ beneficial ownership serta pemanfaatan untuk perizinan, pengadaan barang/jasa, dan penanganan perkara
	Perbaiki Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
	Percepatan proses digitalisasi sertifikasi badan usaha dan profesi pendukung kemudahan berusaha
	Reformasi Tata Kelola Pelabuhan
Kementerian Perindustrian	Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2023 dan 2024
	Penguatan Pengendalian Ekspor dan Impor
	Perbaiki Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
	Reformasi Tata Kelola Pelabuhan
Kementerian Pertanian	Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2023 dan 2024
	Optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah
	Penguatan Pengendalian Ekspor dan Impor
	Peningkatan kualitas data pemilik manfaat/ beneficial ownership serta pemanfaatan untuk perizinan, pengadaan barang/jasa, dan penanganan perkara
	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
	Perbaiki Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
	Reformasi Tata Kelola Pelabuhan
Kementerian Sekretariat Negara	Mengurangi risiko kebocoran pendapatan negara melalui penataan "aset tetap" pemerintah pusat.
Kementerian Sosial	Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2023 dan 2024
	Optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah

KLD melaksanakan AKSI PK 2023-2024

<i>KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH</i>	<i>AKSI</i>
	Perbaiki Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Kepolisian Negara Republik Indonesia	Penguatan Integritas Penanganan Perkara Pidana
	Peningkatan kualitas data pemilik manfaat/ beneficial ownership serta pemanfaatan untuk perizinan, pengadaan barang/jasa, dan penanganan perkara
Komisi Aparatur Sipil Negara	Penguatan Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Merit
Komisi Pemberantasan Korupsi	Penguatan Integritas Penanganan Perkara Pidana
	Penguatan Peran APIP dalam Program Pengawasan Pembangunan
	Peningkatan kualitas data pemilik manfaat/ beneficial ownership serta pemanfaatan untuk perizinan, pengadaan barang/jasa, dan penanganan perkara
	Perbaiki Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Kota Balikpapan	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kota Bandung	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kota Bekasi	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kota Bontang	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kota Cimahi	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kota Denpasar	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kota Depok	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kota Dumai	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kota Palangkaraya	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kota Pekanbaru	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kota Samarinda	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Kota Tangerang	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Lembaga Administrasi Negara	Penguatan Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Merit
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim 2023 dan 2024
	Peningkatan kualitas data pemilik manfaat/ beneficial ownership serta pemanfaatan untuk perizinan, pengadaan barang/jasa, dan penanganan perkara
	Perbaiki Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Mahkamah Agung	Penguatan Integritas Penanganan Perkara Pidana
MIND ID	Penguatan Pengawasan pada Badan Usaha Pemerintah (BUMN, BUMD)

KLD melaksanakan AKSI PK 2023-2024

KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH	AKSI
Otorita Ibu Kota Nusantara	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
Otoritas Jasa Keuangan	Peningkatan kualitas data pemilik manfaat/ beneficial ownership serta pemanfaatan untuk perizinan, pengadaan barang/jasa, dan penanganan perkara
Perusahaan Listrik Negara	Optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah
Provinsi Aceh	Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2023 dan 2024
	Optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah
	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
	Perbaikan Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Provinsi Bali	Optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah
	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
	Perbaikan Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Provinsi Banten	Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2023 dan 2024
	Optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah
	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
	Perbaikan Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Provinsi Bengkulu	Optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah
	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
	Perbaikan Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Provinsi DI Yogyakarta	Optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah
	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
	Perbaikan Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta	Optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah
	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
	Perbaikan Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Provinsi Gorontalo	Optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah
	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
	Perbaikan Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Provinsi Jambi	Optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah
	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta

KLD melaksanakan AKSI PK 2023-2024

<i>KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH</i>	<i>AKSI</i>
	Perbaiki Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Provinsi Jawa Barat	Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2023 dan 2024
	Optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah
	Perbaiki Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah	Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2023 dan 2024
	Optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah
	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
	Perbaiki Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Provinsi Jawa Timur	Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2023 dan 2024
	Optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah
	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
	Perbaiki Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat	Optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah
	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
	Perbaiki Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Provinsi Kalimantan Selatan	Optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah
	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
	Perbaiki Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah	Optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah
	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
	Perbaiki Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur	Optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah
	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
	Perbaiki Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Provinsi Kalimantan Utara	Optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah
	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
	Perbaiki Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah

KLD melaksanakan AKSI PK 2023-2024

<i>KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH</i>	<i>AKSI</i>
	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
	Perbaiki Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau	Optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah
	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
	Perbaiki Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Provinsi Lampung	Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim 2023 dan 2024
	Optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah
	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
	Perbaiki Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Provinsi Maluku	Optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah
	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
	Perbaiki Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Provinsi Maluku Utara	Optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah
	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
	Perbaiki Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Barat	Optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah
	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
	Perbaiki Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur	Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim 2023 dan 2024
	Optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah
	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
	Perbaiki Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Provinsi Papua	Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim 2023 dan 2024
	Optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah
	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
	Perbaiki Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Provinsi Papua Barat	Optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah
	Perbaiki Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

KLD melaksanakan AKSI PK 2023-2024

<i>KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH</i>	<i>AKSI</i>
Provinsi Riau	Optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah
	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
	Perbaikan Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Provinsi Sulawesi Barat	Optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah
	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
	Perbaikan Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan	Optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah
	Perbaikan Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tengah	Optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah
	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
	Perbaikan Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tenggara	Optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah
	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
	Perbaikan Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Provinsi Sulawesi Utara	Optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah
	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
	Perbaikan Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat	Optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah
	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
	Perbaikan Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan	Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2023 dan 2024
	Optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah
	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
	Perbaikan Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara	Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2023 dan 2024
	Optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah
	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
	Perbaikan Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

KLD melaksanakan AKSI PK 2023-2024

<i>KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH</i>	<i>AKSI</i>
PT Angkasa Pura I	Reformasi Tata Kelola Pelabuhan
PT Angkasa Pura II	Reformasi Tata Kelola Pelabuhan
PT Pelabuhan Indonesia	Reformasi Tata Kelola Pelabuhan
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Peningkatan kualitas data pemilik manfaat/ beneficial ownership serta pemanfaatan untuk perizinan, pengadaan barang/jasa, dan penanganan perkara
Sekretariat Wakil Presiden	Penguatan Peran APIP dalam Program Pengawasan Pembangunan